
KATA PENGANTAR

Puji - syukur patut kita naikkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas perkenananNya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu.

LKIP merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja penyelenggaraan pemerintahan Bagian Organisasi selama Tahun 2025 yang ditujukan kepada Bupati Sumba Barat Daya. Dalam LKIP yang disampaikan adalah pertanggungjawaban kinerja, baik keberhasilan maupun kegagalan, atas pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024 untuk mewujudkan sasaran kinerja Bagian Organisasi yang telah ditetapkan melalui RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya periode 2025 s/d 2029.

Penyusunan LKIP Bagian Organisasi Tahun 2025 ini dapat terlaksana dengan baik berkat kerja sama dan kerja cerdas dari semua staf. Namun perlu kami sampaikan bahwa dalam penyusunan LKIP ini masih dijumpai banyak kendala, terutama untuk memenuhi standar LKIP yang baik dan benar sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Demikian LKIP ini, semoga dapat bermanfaat khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dalam upaya untuk melakukan peningkatan pencapaian kinerja yang telah dituangkan dalam RPJMD tersebut di atas.

Sekian dan terima kasih

IKTHISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bagian Organisasi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2025 sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja terhadap apa yang menjadi komitmen yang tertuang dalam RENSTRA dan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025. LKIP ini memuat tentang capaian kinerja sasaran dengan indikator indikator yang jelas dan terukur guna menjelaskan keberhasilan dan kegagalan serta hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Tahun Anggaran 2025 .

Berdasarkan penilaian sendiri (*self assessment*) atas realisasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2025, Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja 2 sasaran adalah 76 %. Keberhasilan ini disumbangkan oleh 2 indikator kinerja yang melebihi target realisasinya.

Secara rinci tingkat capaian seluruh sasaran adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran	Nilai Capaian Kinerja
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	88,7 %
2.	Meningkatkan kualitas reformasi pemerintahan daerah yang profesional, transparan, bersih dan melayani	63,3 %

Keberhasilan atas pencapaian kinerja tahun 2025 sangat dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

1. Tepat waktunya OPD dalam mengumpulkan dokumen-dokumen perencanaan untuk disampaikan ke Kemenpan RB
2. Pelayanan publik pada OPD-OPD tertentu sudah mulai menunjukkan perubahan yang baik

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian kinerja Bagian Organisasi Kabupaten Sumba Barat Daya pada Tahun Mendatang maka akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Dokumen-dokumen perencanaan yang disampaikan ke Kemenpan RB harus tepat waktu

2. Melakukan pelayanan publik yang bagi masyarakat sehingga lebih teratur dan efisien
3. Agar membentuk Tim Evaluasi Sakip yaitu Bagian Organisasi, Baperida dan Inspektorat sehingga dalam mereviu dokumen-dokumen perencanaan tersebut dapat sesuai dengan yang semestinya.
4. Mengadakan Bimtek bagi ASN dalam penyusunan Dokumen- dokumen perencanaan tersebut.

Dalam pencapaian kinerja Bagian Organisasi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 dialokasikan Anggaran sebesar Rp. **767.053.011** dan realisasi anggaran sebesar Rp. **714.163.352** atau sebesar 93,10 %.

Pencapaian kinerja Bagian Organisasi kabupaten Sumba Barat Daya senantiasa diupayakan untuk ditingkatkan terus menerus pada tahun tahun yang akan datang

Tambolaka, 10 Maret 2026
Plt. Kepala Bagian Organisasi

Yohanis Ganti Akal, S.KM
Pembina TK.I-IV/b
NIP. 197001103 199203 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, akan terukur dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan kewajiban bagi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RBRI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 secara rutin melakukan Evaluasi terhadap Kinerja Perangkat Daerah sebagai upaya mewujudkan *good governance* dan sekaligus *result oriented government* melalui pendekatan manajemen berbasis kinerja (*performance basemanagement*) yang

didasarkan pada *cascading* Perjanjian Kinerja antara Bupati dan Pimpinan Perangkat Daerah sampai kepada pelaksana paling bawah

Pencapaian sasaran, sesuai ayat 2, sekurang-kurangnya menyajikan informasi tentang :

1. Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
2. Realisasi pencapaian indikator kinerja utama;
3. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
4. Perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

Dengan berakhirnya tahun anggaran 2025, maka Bagian Organisasi, menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025. LKIP ini menggambarkan kinerja yang dicapai, berhasil atau gagal, atas pelaksanaan program dan kegiatan, sesuai Rencana Strategis Bagian Organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

LKIP juga dapat merupakan sarana untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran berikutnya sehingga kinerja yang dicapai lebih berdayaguna dan berhasilguna.

B. TUJUAN DAN MANFAAT LKIP

Tujuan dan manfaat penyusunan LKIP, sesuai PERMENPAN – RB No.53 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara Reviu atas laporan kinerja Instansi Pemerintah.

1. Tujuan

Tujuan pembuatan LKIP yaitu:

- a. Memberi pertanggungjawaban pelaksanaan program / kegiatan dan anggaran pada tahun anggaran yang telah berjalan kepada Presiden melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- b. Memberi dasar bagi pengambilan keputusan untuk perbaikan dalam mencapai kehematan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), dalam upaya mencapai visi dan misi.
- c. Memberi masukan untuk memperbaiki perencanaan baik jangka pendek maupun menengah.

2. Manfaat

Manfaat pembuatan LKIP yaitu:

- a. Mendorong instansi pemerintah, untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan (dan pembangunan) secara baik dan benar (*good governance*).
- b. Mendorong tumbuhnya instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat dan lingkungannya.
- c. Memberi masukan dan umpan balik bagi yang berkepentingan untuk dasar pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
- d. Memelihara kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah.

C. PROFIL BAGIAN ORGANISASI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

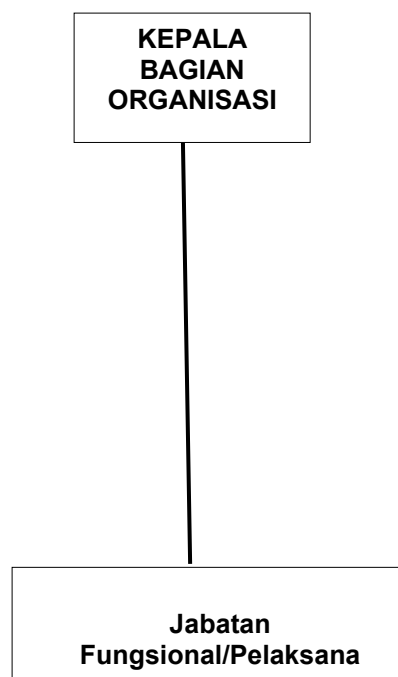
1. Struktur Bagian Organisasi

Struktur Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah pada Kabupaten Sumba Barat Daya, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, sebagai berikut :

- a. Kepala Bagian
- b. Sub Koordinator kegiatan, terdiri dari :
 - Sub Koordinator substansi Kelembagaan dan Analis Jabatan
 - Sub Koordinator substansi Kinerja dan Reformasi Birokrasi
 - Sub Koordinator substansi Pelayanan Publik dan Tata Laksana

Sedangkan bagan struktur Organisasi Bagian Organisasi, sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 17 Tahun 2022.



2. Aspek Strategis

a. Tugas Pokok

Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi.

b. Fungsi

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi.
- Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi.
- Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi.
- Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi.
- Pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Sumber Daya Manusia Pegawai

Sumber daya manusia yang dimaksud adalah keadaan pegawai pada Bagian Organisasi Kabupaten Sumba Barat Daya. Sampai dengan Bulan Desember 2025, keadaan pegawai yang ada pada Bagian Organisasi Kabupaten Sumba Barat Daya dengan perincian sebagai berikut :

a. Menurut latar belakang pendidikan :

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Sarjana S1	12
2	SLTA	4

b. Menurut golongan :

No	Golongan	Jumlah (Orang)
1	Golongan IV	1
2	Golongan III	7
3	Golongan II	1
4	PPPK	6

c. Menurut Jabatan:

No	Eselon	Jumlah (Orang)
1	III/a	1

Susunan Kepegawaian pada Bagian Organisasi Kabupaten Sumba Barat Daya dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

NO	NAMA/ NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	Yohanis Ganti Akal, S.KM NIP.19701103 199203 1 004	Pembina Tingkat I - IV/b	Kepala Bagian Organisasi	Kepala Bagian Organisasi
2	Domingga Tahu Nahak, S.Sos NIP. 19770401 201001 2 011	Penata TK.I - III/d	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Analisis Kebijakan Ahli Muda

3	Nur Kartini Apriany, SE NIP. 19840403 200903 2 010	Penata TK.I - III/d	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Analisis Kebijakan Ahli Muda
4	Daniel Yogi Prakasa, S.PSI NIP.19941216 202012 1 001	Penata Muda - III/a	Analisis Jabatan	Analisis Jabatan
5	Imelda Tresia Hae. SE NIP.19900331 202203 2 007	Penata Muda - III/a	Analisis kebijakan Ahli Pratama	Analisis kebijakan Ahli Pratama
6	Anderias Ako Kamejeti, S.AP NIP.19940929 202203 1 005	Penata Muda - III/a	Analisis Jabatan	Analisis Jabatan
7	Yohanis Bili Dendo, S. Kom NIP. 19801231 200801 1 055	Penata Muda - III/a	Pengelola Pemanfaatan BMD	Pengelola Pemanfaatan BMD
8	Rani Yulia Zogara, S.AB NIP. 19990421 202505 2 003	Penata Muda - III/a	Analisis Kebijakan Ahli Pratama	Analisis Kebijakan Ahli Pratama
10	Zakarian Malo Pare NIP.19771231 200801 1 085	Pengatur - II/c	Bendahara	Bendahara
11	Dinayati Ngongo, S.Sos NIP.19940404 202321 2 061	Kelas IX	Analisis Kebijakan Ahli Pratama	Analisis Kebijakan Ahli Pratama
12	Theresia Indri Fernandes, SKM NIP.19940404 202321 2 061	Kelas IX	Analisis Kebijakan Ahli Pratama	Analisis Kebijakan Ahli Pratama
13	Felisitas Kondo,SE NIP. 19830304 202505 2 013	Kelas IX	Penata layanan Operasional	Penata layanan Operasional
14	Katrina Umbu Zaza NIP. 19881026 202521 2 039	Kelas V	Pengadministrasi Perkantoran	Pengadministrasi Perkantoran
15	Anjelin Y. Carola Renda NIP. 19950910 202521 2 048	Kelas v	Operator Layanan Operasional	Operator Layanan Operasional

4. Sarana dan Prasarana

a. Sarana dan Prasarana

❖ Kendaraan Dinas

Jumlah kendaraan Dinas sebanyak 2 (dua) unit yang terdiri dari 1(satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dan 1 Unit

kendaraan roda 2 (dua) yang merupakan aset Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya

❖ Peralatan Kantor dan Aset lainnya

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
2	Mobil Dinas Toyota Avansa	1	Baik
3	Motor Dinas	1	Baik
4	Laptop	7	2 RB, 5 baik
5	Komputer PC	3	2 baik, 1 Rusak berat
6	Printer	10	Baik
	UPS	3	Baik
	Hardisk eksternal	3	Baik
7	Lemari Rak Kayu	1	RB
	Lemari Kayu	1	Baik
9	Lemari Kayu lokal	2	Baik
10	Kursi putar	1	RB
	Kursi kerja pejabat eselon III	1	Baik
	Kursi Besi/metal	4	RB
	Kursi kayu rotan/bambu	10	BAIK
	Kursi tamu	8	Baik
11	Meja Biro	10	Baik
	Meja kerja pejabat eselon III	1	Baik

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

LKIP ini diawali dengan Kata Pengantar, Daftar Isi dan Ringkasan Eksekutif, sebagai penuntun bagi pihak yang berkepentingan untuk memperoleh gambaran singkat tentang informasi yang disampaikan dalam Batang Tubuh LKIP.

Sedang Batang Tubuh LKIP dibagi dalam 4 (empat) bab yang meliputi:

Bab I. Pendahuluan

Pada Bab I ini menguraikan Latar Belakang, Tujuan dan Manfaat LKIP, Profil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Sistematika Penyajian LKIP.

Bab II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Pada Bab II ini menyajikan Perencanaan Kinerja yang meliputi Pernyataan Visi, Pernyataan Misi, Penetapan Tujuan, dan Penetapan Sasaran. Disamping itu, juga diuraikan tentang Rencana dan Penetapan Kinerja Tahun 2025 serta Rencana Anggaran Tahun 2025.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab III ini menyajikan proses pengukuran kinerja yang meliputi penetapan indikator kinerja, penetapan kinerja dan pengukuran kinerja. Setelah itu dilakukan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, dan akuntabilitas keuangan.

Bab IV. Penutup

Pada Bab IV ini menyampaikan simpulan akuntabilitas kinerja dan rencana tindak strategis untuk peningkatan kinerja.

Disamping Pengantar dan Batang Tubuh tersebut di atas, LKIP ini juga dilengkapi dengan Lampiran Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Bagian Organisasi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025, sebagai data dan informasi pendukung.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis Bagian Organisasi pada Setda Kabupaten Sumba Barat Daya.

Visi Kabupaten Sumba Barat Daya yang ingin dicapai pada periode 2025 -2029 adalah ***"Terwujudnya Kabupaten Sumba Barat Daya Hebat yang Berkarakter, Sehat, Cerdas, Berketahanan Pangan, dan Berbudaya Menyongsong Indonesia Emas 2045"***.

Visi ini mengandung pengertian bahwa kondisi masyarakat Sumba Barat Daya pada masa lima tahun ke depan akan mengalami peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan sebagai dampak dari kemajuan tatakelola pemerintahan dan proses pembangunan yang demokratis dan akuntabel serta pelayanan kebutuhan dasar masyarakat yang lebih berkualitas.

Pengertian-Pengertian :

1. ***Hebat*** : Masyarakat Sumba Barat Daya memiliki produktifitas dan kreatifitas yang tinggi dalam mengolah potensi local menjadi prouk-produk yang berkualitas dan mampu bersaing secara regional nasinal dan Internaional.
2. ***Berkarakter*** : mengandung pengertian bahwa masyarakat Sumba Barat Daya memiliki kepribadian yang kuat, serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan adat istiadat sehingga menjadi cirri khas yang tidak akan hilang oleh perkembangan zaman
3. ***Sehat*** : Masyarakat Sumba Barat Daya sehat secara jasmani dan rohani, sehingga mampu berinteraksi secara aktif dan memiliki kepedulian terhadap sesame yag membutuhkan .

4. **Cerdas:** Masyarakat Sumba Barat Daya memiliki kemampuan intelektual dan emosional yang unggul sehingga adaptif dan mampu bersaing secara regional, nasional, dan internasional.
5. **Berketahanan Pangan :** Masyarakat Sumba Barat Daya mampu mempertahankan ketersediaan pangan secara mandiri dan konsisten dengan memanfaatkan potensi local yang ada, ditengah ancaman perubahan iklim.
6. **Berbudaya :** Masyarakat Sumba Barat Daya selalu menjaga dan memelihara tradisi budaya dan adat istiadat yang diturunkan dari generasi ke generasi untuk menjaga keselarasan dan harmonisasi kehidupan, sehingga menciptakan situasi damai dan sejahtera.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka Misi Pembangunan Kabupaten Sumba Barat Daya pada periode 2025 - 2030 yakni:

1. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan.

Mengembangkan potensi ekonomi local untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

2. Mewujudkan Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan .

Memberikan pelayanan pendidikan yang adil, merata dan berkualitas, serta berupaya meningkatkan mutu pendidikan melalui program pengembang kurikulum dan peingktan kualitas tenaga pendidik.

3. Mewujudkan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat masyarakat Sumba Barat Daya yang sejahtera.

Memberikan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang baik melalui pembangunan fasilitas kesehatan yang memadai, serta mengupayakan penyediaan tenaga medis berkualitas sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, dan melakukan edukasi masyarakat tentang pentingnya kesehatan.

4. Mengoptimalkan Pemberdayaan Masyarakat

Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan melalui penyediaan pelatihanbanuam modal usaha, dan program-program ekonomi masyarakat.

5. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur

Melakukan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan, seperti jalan, jembatan, dan sarana transportasi lainnya untuk mendukung konektivitas dan mobilitas masyarakat serta pereknomian lokal

6. Mewujudkan Kelestarian Lingkungan Hidup

Melakukan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian alam dan pengurangan dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan.

7. Meningkatkan Pelayanan Publik

Meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan public, serta mempercepat proses birokrasi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

3. Tujuan dan Sasaran dan Indikator Sasaran

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran
1	2	3	4
1	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan sistem informasi daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran
1	2	3	4
2	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah sesuai semangat reformasi birokrasi untuk perbaikan pelayanan publik	Meningkatkan kualitas reformasi pemerintahan daerah yang profesional, transparan, bersih dan melayani	Skor hasil evaluasi LKIP Pemerintahan Daerah

A. PROGRAM

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, terpadu dan dilaksanakan yang meliputi program kerja keuangan, program kerja operasional, program kerja sumber daya manusia. Bagian Organisasi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 mempunyai program kerja meliputi :

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

Administrasi umum Perangkat Daerah;

Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah;

Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

Penataan Organisasi

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2025

Rencana Kinerja merupakan kegiatan sangat penting yang perlu dilakukan oleh Pimpinan Instansi di lingkungan Pemerintahan serta merupakan wacana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang ingin dihasilkan. Rencana Kinerja Tahunan yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah sesuai pilihan prioritas.

Rencana Kinerja Tahunan Bagian Organisasi Kabupaten Sumba Barat Daya ini merupakan alat yang bermanfaat untuk mengecek apakah instansi dapat melaksanakan tugas yang telah dibebankan dan mengukur besar pencapaian target-target yang ditetapkan.

Rencana Kinerja Tahunan Bagian Organisasi Kabupaten Sumba Barat Daya disusun mengacu pada Renstra Bagian Organisasi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025-2026. Adapun rencana kinerja tersebut adalah Terlampir.

Tujuan, Sasaran dan Program Strategis jangka Menengah Tahun 2025-2026.

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan sistem informasi daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Pelayanan publik yang baik
2	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah sesuai semangat reformasi birokrasi untuk perbaikan pelayanan publik	Skor hasil evaluasi LKIP Pemerintahan Daerah	Meningkatkan kualitas reformasi pemerintahan daerah yang profesional, transparan, bersih dan melayani	Laporan Hasil Evaluasi LKIP

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki.

Dari uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa perjanjian kinerja yang telah dicanangkan pada awal tahun 2025 sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja dengan targetnya telah dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Kabupaten Sumba Barat Daya dalam tahun anggaran 2025 dengan beberapa program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025 dengan tetap mengacu pada RPJMD tahun 2025-2026.

Adapun mengenai rincian sasaran, indikator kinerja, target dan anggaran pada perjanjian kinerja tahun 2029 Bagian Organisasi Kabupaten Sumba Barat Daya sebagaimana terlampir.

No	Sasaran Strategis	Indikator sasaran	Target
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,7 %
2.	Meningkatkan kualitas reformasi pemerintahan daerah yang profesional, transparan, bersih dan melayani	Skor hasil evaluasi LKIP Pemerintahan Daerah	63.3 %

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	161.927.243,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	28.555.500,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	28.555.500,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	54.312.700,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.404.000,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.172.700,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44.736.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.386.943,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	38.386.943,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.672.100,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.492.100,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.180.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	480.262.900,00
Kegiatan Penataan Organisasi	480.262.900,00
Sub Keg. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	212.113.000,00
Sub Keg. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata	227.719.900,00

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
Laksana Sub Keg. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	40.430.000,00

Uraian prosedur penyusunan RKT dan PK, sudah sesuai dengan prosedur ideal, yaitu: berdasarkan Renstra disusun Renja, kemudian dievaluasi dari aspek anggarannya dan disiapkan Rencana Operasional kegiatan tahun 2025.

D. PERENCANAAN ANGGARAN

Rencana Anggaran Bagian Organisasi Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2025 sebesar **Rp.767.053.011-** yang terbagi dalam :

- Belanja Langsung sebesar Rp. 714.163.352
- Belanja Pegawai Rp.0
- Belanja Barang dan Jasa Rp.
- Belanja Modal Rp.0

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja digunakan untuk menilai kemampuan setiap unit organisasi dalam melaksanakan mandat yang diberikan kepadanya oleh kepala Daerah. Pelaksanaan mandat tersebut diwujudkan dalam prestasi kerja yang diukur berdasarkan Tolak Ukur keluaran dan Hasil yang diperoleh atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disusun sebagai wujud Pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi. Keberhasilan maupun kegagalan penyelenggaraan Misi dapat diukur melalui Evaluasi terhadap kinerja yang dihasilkan.

Untuk menilai Akuntabilitas Kinerja Bagian Organisasi maka ditetapkan Indikator Kinerja. Capaian indikator kinerja ini akan dinilai, dianalisa dan dievaluasi tingkat keberhasilannya. Analisa dan Evaluasi yang dilakukan disajikan menurut sasaran yang dalam Rencana Strategis.

Pada bab ini disajikan proses pengukuran kinerja, uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan.

A. PROSES PENGUKURAN KINERJA

1. Penetapan Indikator Kinerja

Sebelum menguraikan hasil pengukuran kinerja, perlu kiranya dijelaskan mengenai proses pengukuran kinerja terlebih dahulu.

Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauhmana keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator Kinerja Kegiatan yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi Masukan (*input*), Keluaran (*output*), dan Hasil (*outcome*) masing-masing sebagai berikut :

- a. Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran (output), misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya.*
- b. Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.*
- c. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.*

2. Penetapan Kinerja

Langkah selanjutnya adalah menetapkan rencana tingkat capaian (target) kinerja yang diinginkan, melalui penyelarasan RKT 2025 dan PK 2025 dengan Perubahan Anggaran tahun 2025.

3. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja yang direncanakan dengan realisasi kinerja kegiatan, program dan sasaran melalui media berupa Formulir PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan) dan Formulir PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran).

Rumus perhitungan persentase pencapaian kinerja yaitu:

$$\text{Persentase pencapaian Rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana/Target}} \times 100 \%$$

Dari pengukuran kinerja ini akan menggambarkan pencapaian kinerja kegiatan dan program untuk mencapai sasaran SKPD / Unit yang telah ditetapkan.

Predikat penilaian capaian kinerja sasaran dikelompokkan dalam “Skala Pengukuran Ordinal” sebagai berikut :

No	Skala Persentase Capaian Kinerja	Predikat
1	85 % - 100 %	Sangat berhasil
2	70 % - 84 %	Berhasil
3	55 % - 69 %	Cukup berhasil
4	< 55 %	Tidak berhasil

B. URAIAN HASIL PENGUKURAN KINERJA

Sebagaimana telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja tahun 2025, Bagian Organisasi Kabupaten Sumba Barat Daya telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2025 untuk mencapai 2 sasaran.

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja 1 sasaran adalah %.Keberhasilan ini disumbangkan oleh 1 indikator kinerja yang melebihi target realisasinya, namun demikian masih terdapat 1 indikator kinerja yang tingkat keberhasilannya masih sangat rendah.

Secara rinci tingkat capaian seluruh sasaran adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran	Nilai Capaian Kinerja
1.	Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	84%

C. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja Bagian Organisasi Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2025 tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Sasaran : Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel

Kinerja sasaran ini mencapai 84 % dengan predikat berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran tersebut, ditetapkan 1 program dan 1 kegiatan dengan 1 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja nampak seperti dalam tabel berikut :

No	Indikator Sasaran	Tahun 2025		% pencapaian Target
		Target	Realisasi	
1.	Persentase instansi pemerintah dengan skor sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	60,05	50,51	84%
	Rata-rata	60,05	50,51	84%

Pencapaian indikator kinerja ditinjau dari target yang ditetapkan mencerminkan ketidakberhasilan pencapaian sasaran , Adapun indikator yang belum mencapai target disebabkan antara lain oleh:

- Kesiapan SKPD dalam menyampaikan data dan informasi yang dibutuhkan masih sangat minim dan belum menentukan skala prioritas.
- skill teknis SDM sangat terbatas oleh karena kemauan belajar rendah.
- Belum adanya reward and punishment
- Budaya dan etos kerja rendah.

Untuk mengatasi hambatan di atas, telah direncanakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan pelatihan dan pendampingan pengelolaan administrasi.
2. Memberikan panduan dan pendampingan penyusunan laporan.

AKUNTABILITAS KEUANGAN

Bagian Organisasi Kabupaten Sumba Barat Daya
Realisasi APBD Tahun 2025

Aspek keuangan Bagian Organisasi Kabupaten Sumba Barat Daya yang bersumber dari APBD dapat dianalisis sebagai berikut :

Program/Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota			
Kegiatan	Adminitrasi	28.555.500	27.555.500	96%

	Keuangan Perangkat Daerah			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	41.140.700	40.217.886	97,8%
	Penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	37.989.811	28.776.640	75 %
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	36.697.100	35.728.187	97%
	Penataan Organisasi	622.669.900	581.885.139	93%

Dalam pencapaian kinerja Bagian Organisasi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 dialokasikan Anggaran sebesar Rp. dan terealisasi Rp.,- atau sebesar 99 %, atau termasuk sangat baik. Pencapaian realisasi anggaran tersebut memang belum sesuai yang direncanakan yakni 100 %. Hal ini terjadi karena efisiensi anggaran belanja yang terjadi.

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN AKUNTABILITAS KINERJA

1. Keberhasilan Kinerja OPD / Unit

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja sebagaimana yang diuraikan pada BAB III maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Bagian Organisasi pada Setda Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 adalah 99% (sangat Berhasil) Nilai tersebut diperoleh dari perhitungan yang terdapat dalam lampiran pengukuran kinerja.

2. Kegagalan Kinerja Bagian Organisasi Kabupaten Sumba Barat Daya

Mencermati hasil pengukuran kinerja dan evaluasi bahwa kegagalan kinerja organisasi ini karena beberapa aspek, terutama yang paling berpengaruh adalah sumber daya manusia yang terbatas baik kualitas maupun kuantitas dan kesadaran untuk bekerja dari setiap aparatur.

3. Hambatan Utama yang Dihadapi

Adapun hambatan yang dialami adalah koordinasi lintas sektor yang mengalami disparitas pemahaman.

B. RENCANA TINDAK STRATEGIS PENINGKATAN KINERJA

1. Strategi Peningkatan Kinerja

Mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada untuk mengukir prestasi dan kinerja yang lebih baik.

2. Strategi Pemecahan Masalah dan Langkah Antisipatif.

Mengidentifikasi seluruh potensi yang ada dan memaksimalkan pemanfaatannya.

Tambolaka, 10 Maret 2026
Plt. Kepala Bagian Organisasi

Yohanis Ganti Akal, S.KM
Pembina TK.I-IV/b
NIP. 197001103 199203 1 004